

**SUPPLY CHAIN POLICY
PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA**

**KEBIJAKAN RANTAI PASOKAN
PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA**

PT Belitung Industri Sejahtera fully supports and committed to making sure our supply chains are free of armed conflicts and serious human right abuse.

Our policy is to avoid the use of any natural ore of tin which directly or indirectly finances or benefit the armed group in the conflict-affected area in the Democratic Republic of Congo or adjoining countries

We fully supports the objectives of the US Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 which defines Conflict Minerals and Metals, committed effort to reduce or end the violent in DRC and it's adjoining countries. We will collaborate with any industry group that have same pace of this humanitarian goals, committed to support data/information for due diligent in Conflict free Smelter Program initiated by RMI.

Source Materials only come from suppliers who have a good reputation, have an IUP (Mining Permit) and have complied with the regulations of the Indonesia government and have adequate due diligence in relation to the Know Your Counterparty (KYC) protocol.

We declare to the international community, that conflict minerals has never been used in any parts of PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA supply chain and products. As such, all our products are conflict-free.

PT Belitung Industri Sejahtera will act on this commitment :

- Have a management system for OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRAs)

PT Belitung Industri Sejahtera sepenuhnya mendukung dan berkomitmen untuk memastikan rantai pasokan kami bebas dari konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Kebijakan kami adalah untuk menghindari penggunaan bijih timah alami yang secara langsung atau tidak langsung membiayai atau menguntungkan kelompok bersenjata di daerah yang terkena dampak konflik di Republik Demokratik Kongo atau negara-negara yang berdekatan.

Kami sepenuhnya mendukung tujuan Reformasi Dodd Frank Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen AS tahun 2010 yang mendefinisikan Mineral dan Logam Konflik, upaya berkomitmen untuk mengurangi atau mengakhiri kekerasan di DRC dan negara-negara sekitarnya. Kami akan berkolaborasi dengan kelompok industri mana pun yang memiliki langkah yang sama dalam tujuan kemanusiaan ini, berkomitmen untuk mendukung data/informasi untuk rajin dalam Program Peleburan Bebas Konflik yang diprakarsai oleh RMI.

Bahan hanya berasal dari pemasok yang memiliki reputasi baik, memiliki IUP dan telah memenuhi regulasi pemerintah Republik Indonesia serta memiliki uji tuntas memadai sehubungan dengan protokol Know Your Counterparty (KYC).

Kami menyatakan kepada masyarakat internasional, bahwa mineral konflik tidak pernah digunakan di rantai pasokan dan produk PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA. Dengan demikian, semua produk kami bebas konflik.

PT Belitung Industri Sejahtera akan bertindak atas komitmen ini :

- *Memiliki sistem manajemen untuk Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Area yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi.*

**SUPPLY CHAIN POLICY
PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA**

**KEBIJAKAN RANTAI PASOKAN
PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA**

- Cooperate with customers to comply with applicable legislation's requirement such as The U.S. Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act (July 2010), which encourages legitimate, conflict-free trades of minerals sourced from The Democratic Republic of Congo (DRC) and the Great Lakes Region of Africa.

- Neither tolerate nor by any mean profit, contribute to assisting or facilitate the commission by any party of:

a. Any form of torture, cruel, inhuman and degrading treatment

b. Any form of forced or compulsory labour, worst forms of labour child

c. Other gross human rights violations and abuses like sexual violence

d. War crimes or other violations of severe international humanitarian law, crimes against humanity or genocide

- Not tolerate any direct or indirect support to non-state armed groups through the extraction, transport, trade, handling or export of minerals

- Not tolerate any direct or indirect support private security which is conducting illegal activities

- Not tolerate any bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of minerals such as money laundering and non-payment of taxes and royalties to governments

- Publicity communicate our ethical and sustainable sourcing policy to our suppliers, customer, employees and investors

- Prohibited procurement for secondary tin in any forms.

- *Bekerja sama dengan pelanggan untuk mematuhi persyaratan undang-undang yang berlaku seperti The US Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act (Juli 2010), yang mendorong perdagangan mineral yang sah dan bebas konflik yang bersumber dari Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Wilayah Danau Besar Afrika.*

- *Tidak mentolerir atau dengan cara apa pun mencari keuntungan, berkontribusi untuk membantu atau memfasilitasi komisi oleh pihak mana pun dari:*

a. *Segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat*

b. *Segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.*

c. *Pelanggaran dan pelanggaran HAM berat lainnya seperti kekerasan seksual.*

d. *Kejahatan perang atau pelanggaran berat hukum humaniter internasional lainnya, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.*

- *Tidak menoleransi dukungan langsung atau tidak langsung kepada kelompok bersenjata non-negara melalui ekstraksi, pengangkutan, perdagangan, penanganan atau ekspor mineral*

- *Tidak menoleransi setiap dukungan langsung atau tidak langsung pengamanan yang melakukan kegiatan aktivitas ilegal*

- *Tidak menoleransi kegiatan penyuaipan dan penipuan yang tidak mencerminkan terkait asal usul mineral seperti pencucian uang dan tidak membayar pajak dan royalti yang harus dibayarkan kepada pemerintah*

- *Mengomunikasikan kepada khalayak umum (publik) terkait kebijakan rantai pasokan kami yang etis dan berkelanjutan kepada pemasok kami, pelanggan, karyawan, dan investor*

- *Larangan pengadaan timah sekunder dalam bentuk apapun.*

**SUPPLY CHAIN POLICY
PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA**

**KEBIJAKAN RANTAI PASOKAN
PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA**

- Directors and Managers are authorized to oversee policy and the control structure, conduct regular internal checks and ensure due diligence is executed soundly.

Direksi dan Manajer berwenang untuk mengawasi kebijakan dan struktur mengendalikan, melakukan pemeriksaan internal secara berkala dan memastikan due diligence dilaksanakan dengan baik.

Belitung , 5 Agustus 2022



Mahjudin Mulia
Direktur Utama / President Director

Revision 2.0

Revisi 2.0